

# Revisi PP Jalan Tol Mendekati Final

REVISI Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2005 tentang Jalan Tol dipastikan hampir selesai. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan draf tersebut saat ini sudah berada di Sekretariat Kabinet (Setkab).

“Revisi PP ini sudah hampir final. Sekarang sudah ada di Setkab. Kami tinggal diundang sekali lagi oleh Setkab sebelum diparaf oleh Presiden,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Ia mengungkapkan salah satu klausul revisi peraturan tersebut yakni memasukkan penunjukan pemerintah terhadap badan usaha milik negara (BUMN) untuk membangun jalan tol.

Setelah revisi PP rampung, pemerintah juga akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) yang berisi penunjuk-

an langsung terhadap BUMN untuk mengerjakan proyek jalan bebas hambatan.

Selama ini pengerjaan jalan tol lebih banyak dilakukan PT Jasa Marga Tbk. Namun, Jasa Marga tidak bisa mengerjakan proyek-proyek infrastruktur, khususnya jalan tol, jika diberi penugasan dari pemerintah. Hal itu disebabkan perlu persetujuan dari seluruh pemegang saham BUMN yang telah tercatat dalam pasar modal itu.

“Jadi, di satu sisi peraturan pemerintah ini diperbaiki. Sedangkan di peraturan lain tentang konsep penunjukan langsung BUMN jalan tol ini juga sedang berjalan,” terang Djoko.

Dirinya berharap perubahan peraturan pemerintah dan peraturan presiden mengenai

penunjukan langsung tersebut dapat terbit pada tahun ini juga. Dengan begitu, pemerintah bisa segera mengerjakan proyek jalan tol yang meski kurang layak secara finansial, layak secara ekonomi.

“Sejauh ini BUMN yang diusulkan ialah PT Hutama Karya (HK). Jadi penunjukan HK sebagai BUMN jalan tol ini bersamaan dengan diketuknya PP tersebut,” kata dia.

Corporate Secretary HK Ari Widiyantoro mengatakan ada tiga instrumen hukum yang dibutuhkan untuk melegalkan pihaknya menjadi BUMN jalan tol. “Kami masih tunggu perubahan PP No 15/2005 serta dua perpres yakni tentang penunjukan dan penyertaan modal negara.” (Atp/E-2)